



'Over Tourism' di Yogyakarta



OVER tourism adalah kondisi ketika jumlah dan intensitas kunjungan wisatawan telah melampaui daya dukung suatu wilayah, meski secara ekonomi profitable, ramai dan menguntungkan namun menimbulkan ketidaknyamanan serius terhadap kualitas hidup warga lokal, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan sosial-budaya.

Fenomena *over tourism* di Yogyakarta tidak terjadi secara gradual dan samar, melainkan hadir telanjang dan kasat mata pada puncak libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, khususnya pada 29-31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, kota ini menerima beban kunjungan yang melampaui kapasitas ruang, infrastruktur, dan daya dukung sosialnya. Yogyakarta tidak sekadang ramai, tetapi padat hingga nyaris lumpuh.

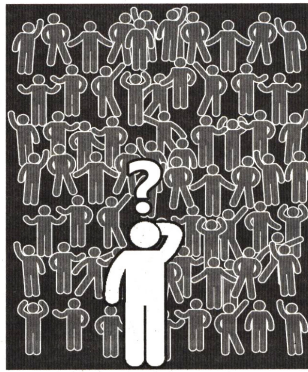
Data pemerintah daerah menunjukkan, selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, lebih dari satu juta wisatawan masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada puncaknya, kawasan Malioboro saja dipadati sekitar 24 ribu pengunjung per hari. Angka ini jauh melampaui fungsi normal kawasan heritage yang semestinya menjadi ruang publik, ruang budaya, dan ruang hidup warga. Jalan utama macet berjam-jam, parkir liar merebak, transportasi publik tidak mampu menyerap, lonjakan mobilitas, dan ruang pejalan kaki kehilangan makna keselamatannya.

Lonjakan tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga pada kualitas layanan publik. Sistem lalu lintas kolaps, akses warga lokal terganggu, sampah meningkat drastis dalam hitungan hari, dan aparat dipaksa bekerja dalam kondisi darurat. Hotel dan akomodasi menecat tingkat hunian hingga sekitar 80 persen, namun ironisnya kepadatan wisatawan tidak berbanding lurus dengan kendali distribusi dan tata kelola. Kota menerima terlalu banyak orang dalam waktu yang terlalu singkat, tanpa instrumen pembatasan yang memadai.

Masalah utama *over tourism* di

AA Haslan

Yogyakarta terletak pada absennya manajemen kunjungan berbasis daya dukung. Pemerintah terlalu fokus pada promosi dan angka kunjungan, tetapi lemah dalam pengendalian. Tidak ada batas maksimal wisatawan harian di kawasan sensitif, tidak ada sistem pengaturan waktu kunjungan, dan tidak ada mekanisme penyebaran arus wisata secara adil ke wilayah penyangga. Akibatnya, beban menumpuk di pusat kota, sementara kawasan lain hanya menjadi penonton.



KR-JONG SANTOSO

Masalah kedua adalah ketimpangan antara manfaat ekonomi dan beban sosial. Wisatawan memang membelanjakan uang dalam jumlah besar, namun manfaatnya terkonsentrasi pada sektor tertentu. Sementara itu, warga menanggung eksternalitas berupa kemacetan, kenaikan harga, tekanan ruang hidup, dan degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, pariwisata tumbuh sebagai industri, tetapi melemah sebagai instrumen kesejahteraan publik.

Masalah ketiga yang lebih struktural adalah kegagalan integrasi antara kebijakan pariwisata dan tata kota. Pariwisata diperlakukan sebagai sektor terpisah, bukan bagian dari sistem ruang hidup. Kota dipaksa melayani lonjakan wisata tanpa kesiapan infrastruktur, tanpa pengaturan transportasi terpadu, dan tanpa perlindungan ruang publik. Inilah ciri klasik *over tourism*:

ketika kota bekerja melampaui kapasitasnya sendiri.

Solusi atas masalah ini tidak bisa lagi bersifat kosmetik atau reaktif. Yogyakarta membutuhkan perubahan paradigma. Pertama, pemerintah harus menetapkan batas kunjungan berbasis daya dukung, terutama di kawasan heritage dan pusat kota. Tidak semua orang bisa masuk pada waktu yang sama, dan pembatasan harus dipahami sebagai perlindungan, bukan penghambat ekonomi.

Kedua, diperlukan sistem manajemen kunjungan berbasis waktu dan zonasi. Arus wisata harus disebar, bukan ditumpuk. Kawasan penyangga harus diperkuat dengan infrastruktur, atraksi, dan transportasi yang layak agar tekanan tidak terpusat di Malioboro dan pusat kota.

Ketiga, pemerintah perlu berani menghentikan logika isebanyak-banyaknya wisatawan. Fokus harus bergeser pada kualitas kunjungan, lama tinggal, dan distribusi manfaat ekonomi. Pariwisata harus melayani warga, bukan sebaliknya.

Over tourism adalah krisis pengelolaan, bukan krisis wisatawan. Ia muncul ketika pariwisata dikejar sebagai angka, bukan diatur sebagai sistem kehidupan. Dampaknya tidak langsung meruntuhkan kota, tetapi menggerogoti perlahan: kualitas hidup turun, lingkungan rusak, budaya kehilangan ruh, dan warga terpinggirkan. Jika dibiarkan, destinasi tetap ramai tetapi kota kehilangan makna kehidupan yang manusiawi. (*)

**AA Haslan, Pemerhati Pariwisata & UMKM.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005